

BAB VI

PENUTUP

6.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Representasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka, penulis menyimpulkan bahwa representasi deskriptif, representasi simbolik dan hambatan-hambatan politik berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Dapil II Malaka. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

6.2.1 Representasi Deskriptif

Representasi deskriptif maksudnya bentuk perwakilan politik perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka berdasarkan kesamaan kesamaan wilayah/etnis/Suku dan kesamaan agama.

➤ Kesamaan Wilayah/Etnis/Suku

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor etnis tidak menjadi suatu pondasi atau pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih caleg perempuan. Masyarakat cenderung memilih caleg yang memiliki modal sosial, modal ekonomi, kualifikasi pendidikan dan dan caleg dapat merangkul dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

➤ Kesamaan Agama

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor agama tidak menjadi suatu pondasi atau pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih caleg perempuan. Masyarakat cenderung memilih caleg yang memiliki modal sosial, modal ekonomi, hubungan kekeluargaan, kesamaan wilayah,

pendidikan, ketokohan dalam masyarakat dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.

6.2.2 Representasi Simbolik

Representasi simbolik maksudnya bentuk perwakilan politik perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka berdasarkan kesamaan kepentingan dalam memperjuangkan segala macam permasalahan perempuan di dapil mereka masing-masing dan kepentingan umum yang sangat urgen di dapil mereka masing-masing.

- Kesamaan kepentingan dalam memperjuangkan segala macam permasalahan perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya representasi atau tingkat keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Kabupaten Malaka tidak bisa dilepaskan dari kurangnya caleg perempuan yang mengkampanyekan isu-isu yang berbasis gender atau kepekaan terhadap perempuan seperti mengkampanyekan permasalahan perempuan (Kasus Pemerkosaan, KDRT, *Human Trafficking*, Kesehatan, Pendidikan dan Lowongan Kerja) hal ini disebabkan tidak adanya kampanye yang dilakukan oleh caleg perempuan karena kurangnya atau keterbatasan sumber dana sehingga tidak pernah melakukan kampanye politik serta caleg perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif hanya untuk memenuhi 30 % keterwakilan perempuan

- Kesamaan Kepentingan dalam memperjuangkan kepentingan umum yang sangat urgen di dapil mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya representasi atau

tingkat keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Kabupaten Malaka tidak bisa dilepasnya dari kurangnya caleg perempuan yang mengkampanyekan isu atau kepentingan umum yang sangat urgen di dapil mereka masing-masing (Air Minum, Sampah, Pendidikan, Kesehatan, dan UKM)

6.2.3 Hambatan-Hambatan Politik Perempuan

Hambatan-Hambatan Politik Perempuan maksudnya hambatan yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di Di Dapil II Malaka karena kurangnya Diklat Politik, Jenjang kaderisasi dan Lemahnya sumber dana dalam aktivitas penggalangan massa serta atribut kampanye.

➤ **Diklat Politik**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Malaka karena tidak adanya diklat politik bagi caleg perempuan. Caleg perempuan yang bertarung dalam pemilihan legislatif di Dapil II Malaka kebanyakan bukan merupakan kader partai dan belum pernah melakukan pendidikan dan diklat politik yang dilakukan oleh partai politik

➤ **Jenjang kaderisasi**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Malaka karena tidak berjalannya proses pendidikan politik di tubuh partai lewat proses kaderisasi. Kebanyakan caleg perempuan yang bertarung di Dapil II Kabupaten Malaka hanya memenuhi keterwakilan 30 % perempuan.

➤ **Lemahnya sumber dana dalam aktivitas penggalangan massa serta atribut**

kampanye.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Malaka karena kurangnya sumber keuangan caleg perempuan sebagai penggerak dan pelumas yang digunakan untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan alat peraga kampanye seperti sticker, spanduk dan baliho berpengaruh terhadap keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Malaka dalam pemilihan legislatif 2019.

6.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis dapatkan diatas berkaitan dengan Representasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka, maka saran yang ingin penulis berikan yaitu:

- Kedepannya kepada partai politik yang ada di Kabupaten Malaka, perlu melakukan diklat politik dan kaderisasi kepada caleg perempuan sehingga mempunyai pemahaman politik yang baik.
- Kedepannya kepada caleg perempuan di Kabupaten Malaka harus memiliki finansial atau keuangan baik sehingga dapat menunjang kegiatan kampanye politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara.
- Arikunto Suharsimi. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Esty Ekawati. (2014). Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 11(2).
- Evodius Landu Praing. (2019). *Studi Tentang Beberapa Hambatan Dalam Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Sumba Timur, Tahun 2019 (Studi Kasus Di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Sumba Timur)*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Hadari Namawi. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press : Malang.
- Hasan, M. I. (2009). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1).
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Marsianus Tagung. (2022). *Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kasus Tentang Ketidakterpilihan Calon Legislatif Perempuan Di Dapil 1 Manggarai Timur Tahun 2019)*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Maryadi, dkk. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi*. BP-FKIP UMS.
- Matthew Miles, M. H. dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). UI Press.
- Mukarom, Z. (2008). *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang*

Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2).
<https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>

Nuri Soeseno. (2013). *Representasi Politik*. Puskapol FISIP UI.

Nurul Asnawiah & Titin Purwaningsih. (2020). Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(1).

Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1). <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2017-2021 KABUPATEN MALAKA.
(2021). *RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2017-2021 KABUPATEN MALAKA*.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.